



LAPORAN

SEMINAR

“ANALISIS DAN PERAMALAN ANGGARAN MAKROEKONOMI”

12 – 19 MARET 2016

WASHINGTON, D.C.



SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

JAKARTA, APRIL 2016

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

House Democracy Partnership (HDP) mempertemukan Anggota Dewan dari parlemen Amerika Serikat dengan parlemen-parlemen negara-negara demokrasi dalam rangka memperkuat badan legislative tersebut dengan menggunakan model langsung (peer to peer). Kemitraan ini dibentuk pada tanggal 14 Maret 2005 dan bersifat bipartisan, sebuah komisi yang beranggotakan 20 anggota *House* Amerika Serikat yang bekerja langsung dengan parlemen dari 17 negara mitra di seluruh dunia untuk mendukung pengembangan badan institusi legislative yang efektif, mandiri dan responsive. Ketua Komisi adalah Peter Roskam dan Anggota terhormat David Price yang memimpin Komisi ini. HDP adalah penerus tak langsung dari satuan tugas Frost-Solomon, yang membantu parlemen-parlemen dari 10 mnegara demokrasi baru di Eropa Tengah dan Timur dari tahun 1990 sampai dengan 1996.

Program *House Democracy Partnership* (HDP) bekerjasama dengan *International Republican Institute* (IRI) dan *National Democratic Institute* (NDI) mengadakan seminar dan pelatihan tentang “Analisis dan Peramalan Anggaran Makroekonomi” dengan peserta dari negara Klombia, Indonesia, Kenya, Kosovo, Liberia, Peru dan Timor Leste pada tanggal 12 Maret sampai dengan 19 Maret 2016 di Washington D.C., Amerika Serikat.

Melalui program ini, akan dilakukan pertemuan-pertemuan dengan Anggota *House* Amerika Serikat, staff *House*, staff ahli dari berbagai komisi Kongres, perwakilan dari instansi pemerintah yang mendukung Kongres yaitu *Congressional Research Service* (CRS), *Congressional Budget Office* (CBO) dan *Government Accountability Office* (GAO), dan para ahli ekonomi anggaran lainnya dalam rangka memberikan materi, mengenalkan dan berbagi pengalaman terkait analisis dan peramalan anggaran makroekonomi dalam pekerjaan yang dilakukan di Amerika Serikat. HDP akan mengenalkan strategi untuk melakukan peramalan dan teknik analisis makroekonomi.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari program ini adalah mengenalkan strategi untuk melakukan peramalan dan teknik analisis makroekonomi, serta mempelajari cara-cara dalam mengolah dan mempersembahkan informasi ke dalam suatu format. Disamping itu peserta dapat mengetahui, bertukar informasi dan mendapatkan pelajaran serta pengalaman dari peserta negara lain.

Adapun tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kemampuan staf dalam membuat keputusan/kebijakan yang bisa dipertanggungjawabkan dalam instansinya. Disamping itu untuk mengetahui dan mempelajari pembentukan dan pengembangan sebuah kantor anggaran.

C. Kegiatan

Kegiatan yang dilakukan dalam program ini adalah melalui seminar, diskusi dan pelatihan yang dilakukan dari 12 Maret sampai dengan 19 Maret 2016, dengan materi sebagai berikut:

- Sistem dan proses anggaran di Amerika Serikat;
- Tentang *Congressional Research Service (CRS)*, *Congressional Budget Office (CBO)* dan *Government Accountability Office (GAO)*;
- Dinas Pengelolaan Anggaran (OMB);
- Politik proses anggaran dan pengeluaran dana Kongres;
- Simulasi dan proses anggaran Kongres;
- Peraturan dan proses kebijakan perpajakan;
- Pengeluaran dana pemerintah;
- Analisis makroekonomi;
- Perkiraan dana;
- Presentasi dan metode analisa;
- Pengenalan gedung parlemen (Capitol);
- Rencana aksi negara;
- Kantor Anggaran
- Belajar dan berbagi pengalaman dari peserta negara lain.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Agenda Kegiatan

Waktu	Kegiatan	Tempat	Keterangan
12 Maret 2016			
15.25	Tiba di Bandara Internasional Washington Dulles	Washington, D.C.	Perbedaan waktu, Amerika -11 jam dari Indonesia
16.30	Check in	Hotel Capitol Skyline	10 I Street SW Washington, DC 20024 (202) 488-7500
13 Maret 2016			
14.00 s.d. 17.00	Wisata Washington dan tempat-tempat sejarah		
14 Maret 2016			
10.00	Sambutan dan perkenalan	Ruang Meeting Kongres Utara, Capitol Centre	<ul style="list-style-type: none"> • Michele Bekkering, Direktur IRI; • Justin Wein, Direktur staf untuk Kongres; • Keith Schulz, Penasehat Pemerintah, US..Agency International Development; • Scott Hubli, Direktur NDI; • Catie Lott, Analis, CBO

Waktu	Kegiatan	Tempat	Keterangan
11.00	<i>Congressional Research Service (CRS)</i>		Jim Saturno, Staf CRS
14.45	<i>Congressional Budget Office (CBO)</i>		Chisti Hawley Anthony, Staf CBO
16.15	Pengelolaan dan Anggaran (OMB)		Mathew, staf OMB
15 Maret 2016			
09.00	Politik proses anggaran dan pengeluaran dana Kongres	Ruang Meeting Kongres Utara, Capitol Centre	Kenneth Gold Ph.D, Direktur, Government Affairs Institute, Georgetown University.
10.30	Simulasi proses anggaran kongres		Joshua Huder, Ph.D, Senior Fellow, Government Affairs Institute, Georgetown University
13.00	Peraturan dan proses kebijakan perpajakan		Laura Blessing, Ph.D, Senior Fellow, Government Affairs Institute, Georgetown University
14.30	Proses pengeluaran dana pemerintah		Mark Harkins, Senior Fellow, Government Affairs Institute, Georgetown University
15.45	Divisi analisis makroekonomi		Robert Arnold, Analis CBO

Waktu	Kegiatan	Tempat	Keterangan
16 Maret 2016			
10.00	Perkiraan dana, CBO	Ruang Meeting Kongres Utara,	Megan Carol, Analis CBO
11.45	Presentasi dan metode analisa	Capitol Centre	Staff CRS
14.00	Tour Gedung Capitol		Humas
15.30	Diskusi mengenai rencana aksi negara		Kolombia, Peru, Indonesia, Kosovo, Kenya, Liberia dan Timor Leste dibantu staff dari IRI
17 Maret 2016			
10.00	Membentuk kantor anggaran	Auditorium, Capitol Centre	Teri Gullo, Pimpinan CBO
13.45	Komisi anggaran terkait pengeluaran dana, cara dan sarana		Joseph Cartilo dan Dina, Staff Komisi
15.15	Presentasi Negara-negara peserta, serta belajar dan berbagi pengalaman dari peserta negara lain		Kolombia, Peru, Indonesia, Kosovo, Kenya, Liberia dan Timor Leste dibantu Direktur IRI, Michele Bekkering
18 Maret 2016			
10.00	Komunikasi antar instansi	Auditorium,	GAO
11.15	Melanjutkan rencana aksi negara	Capitol Centre	Peserta dibantu Staff IRI
19 Maret 2016			
13.15	Washington – Tokyo – Jakarta		Kembali ke Indonesia

Waktu	Kegiatan	Tempat	Keterangan
21 Maret 2016			
00.27	Tiba di Bandara Soekarno Hatta Jakarta		Perbedaan waktu, Indonesia +11 jam dari Amerika

B. Peserta

Program ini diikuti oleh 7 negara peserta, sebagai berikut:

1. Kolombia

- Mr. Lucio Munoz menses, Penasehat Senat
- Mr. Raul Alberto Aponte Vargas, Penasehat Dewan untuk Komisi Anggaran Publik dan Keuangan
- Mr. Luis Alberto Palacios Ibanez, Penasehat Dewan untuk komisi Anggaran Publik dan Keuangan

2. Indonesia

- Ms. Siti Atika, Kepala Subbagian Sekretariat Badan Anggaran DPR RI
- Ms. Arsita Putri Winanda, Analis Anggaran
- Mr. Sukmalalana, Ananlis Anggaran
- Ms. Prisila Toar, IRI Accountant

3. Kenya

- Mr. George Abasy Nengo, Direktur Hubungan Parlemen
- Mr. Evans Oanda, Staf Asisten, Komisi Keuangan, Perencanaan dan Perdagangan
- Mr. Bett Kipchirchir Victor, Staf Asisten, Komisi Keuangan, Perdagangan dan Anggaran
- Ms. Amran Habiba Yunis Mursal, Analis Keuangan, Kantor Anggaran Parlemen

4. Kosovo

- Mr. Agim Krasniqi, Wakil Menteri Keuangan, mantan Direktur Anggaran Negara
- Mr. Mehmet Simnica, Analis, Komisi Akun Publik

- Mr. Shaip Goxhuli, Ananlis, Komisi Pendidikan, Sains dan Teknologi

5. Liberia

- Mr. F. Julius Caesar, Direktur Kantor Anggaran Liberia (LBO)
- Ms. Loratha A. Pewu, Analis Anggaran, LBO
- Mr. Samuel G. Tennie, Asisten Riset, Badan Inormasi Legislatif

6. Peru

- Mr. Rodolfo Acuna Namihias, Direktur Anggaran Publik, Kementerian Ekonomi dan Keuangan
- Mr. Samuel Morales, Direktur Umum Administrasi
- Mr. Fernando Flores Sifuentes, Kepala Perencanaan dan Anggaran
- Mr. Roberto Hernandez de la Cruz, Sekretaris Teknis, Komisi Anggaran dan Akun Umum Republik

7. Timor Leste

- Mr. Juvenal Fraga, Analis Hukum
- Ms. Petronela da Silva Alves, Analis Anggaran Sektor
- Mr. Francisco da Silva, Direktur Ekonomi dan Anggaran, Kementerian Keuangan
- Mr. Karlito Nunes, IRI Senior Program Officer

C. Kegiatan yang dilakukan

Kegiatan yang dilakukan tanggal 12 Maret sampai dengan 19 Maret 2016 dengan program kegiatan yaitu wisata pengetahuan, seminar, diskusi, pelatihan, presentasi, serta belajar dan berbagi pengalaman dengan sesama peserta dari negara lain, mengenai hal sebagai berikut:

1. Tour pengetahuan

- a. Wisata Washington mengunjungi Capitol Hills, Museum, Monument. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 13 Maret 2014 dalam rangka mengenal dan mengetahui tentang Amerika dan sejarah negaranya.
- b. Wisata Gedung Capitol
Peserta diajak wisata Gedung Capitol dipandu oleh Humas Gedung Capitol. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2016.

Tour Gedung Capitol





Seluruh peserta seminar bersama salah satu Anggota Kongres, David Price

2. Congressional Budget Office (CBO)

Pendirian CBO

Pada awal tahun 1920an, Presiden mulai mendapat peran yang lebih penting dalam menetapkan anggaran federal. Undang-undang Anggaran dan Akutansi memberikan Presiden tanggung jawab menyeluruh atas perencanaan anggaran dengan mengharuskannya untuk menyerahkan pengusulan anggaran yang komprehensif tiap tahunnya; Undang-undang tersebut juga telah meluaskan kontrol Presiden atas informasi penganggaran dengan membentuk Biro Anggaran (diganti namanya menjadi Kantor Manajemen dan Anggaran pada tahun 1971). Sebaliknya, Kongres kekurangan kapasitas institusional untuk menetapkan dan menggerakkan prioritas anggaran, mengkoordinasikan langkah-langkah untuk legislasi pengeluaran dan pendapatan, atau membangun informasi penganggaran dan ekonomi yang independen dari eksekutif.

Konflik antara legislatif dan eksekutif mencapai puncaknya pada musim panas tahun 1974, ketika Anggota berkeberatan atas ancaman mantan Presiden Nixon untuk menahan alokasi Kongres untuk program-program

yang tidak sesuai dengan kebijakannya (sebuah proses yang dikenal dengan 'pembintangan'). Perselisihan tersebut sampai mengakibatkan diterbitkannya undang undang Kongres tentang Kontrol atas Anggaran dan Pembintangan pada bulan Juli tahun 1974.

Undang-undang Anggaran menegaskan kembali pengawasan konstitusional Kongres atas anggaran dengan menetapkan prosedur baru untuk pengawasan pembintangan dan dengan memulai proses formal dimana Kongres dapat membangun, mengkordinasikan, dan melaksanakan prioritas penganggaran yang independen dari Presiden. Sebagai tambahan, Undang-undang tersebut mengamanatkan pembentukan beberapa institusi legislatif baru untuk melengkapi proses anggaran Kongres yang baru: Komisi Anggaran DPR dan Senat untuk mengawasi pelaksanaan proses anggaran dan Kantor Anggaran Kongres untuk menyediakan informasi yang obyektif dan tidak memihak tentang isu-isu penganggaran dan ekonomi kepada komisi anggaran. Badan ini memulai bekerja pada tanggal 24 Pebruari 1975, dan Alice Rivlin diangkat sebagai direktur yang pertama.

Sejak dibentuk pada tahun 1974, Kantor Anggaran Kongres (CBO) telah menghasilkan analisis mengenai anggaran dan isu-isu ekonomi yang independen untuk mendukung proses anggaran di Kongres. Badan ini sangat non-partisan dan melakukan analisis yang obyektif dan tidak berpihak, seperti yang dapat dilihat dari setiap lusinan laporan dan ratusan estimasi biaya dan dikerjakan oleh para ekonom dan para analis kebijakan setiap tahunnya. Semua pegawai CBO diangkat langsung hanya berdasarkan pada kompetensi profesional tanpa memandang afiliasi politiknya. CBO tidak membuat rekomendasi kebijakan, dan setiap laporan dan estimasi biaya memperlihatkan asumsi dan metodologi yang jelas dari badan ini. Semua produk CBO, selain dari estimasi perkiraan biaya informal untuk legislasi yang dibuat secara tersendiri oleh Anggota Kongres atau stafnya, tersedia untuk Kongres dan masyarakat melalui website CBO.

Organisasi CBO

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden pro tempore Senat secara bersama-sama menunjuk Direktur CBO, setelah mempertimbangkan rekomendasi dari komisi anggaran dari keduanya. Direktur diangkat untuk masa kerja 4 tahun, dan dapat diangkat kembali untuk jabatan tersebut; dan seorang direktur yang berkerja di masa akhir term-nya dapat meneruskan kerja sampai penggantinya diangkat. UU Anggaran dan Pengawasan atas Pemblokiran tahun 1974 menegaskan bahwa Direktur CBO dipilih tanpa mempertimbangkan afiliasi politiknya.

Staf CBO yang lain, seperti wakil direktur, diangkat oleh Direktur. Direktur-direktur CBO mempunyai tradisi yang kuat untuk tetap mempertahankan staf dari pendahulunya. Mereka diangkat atas kompetensi profesional, tanpa melihat afiliasi politiknya. Jumlah staf CBO adalah 230 orang. Kebanyakan adalah para ekonom atau analis kebijakan publik dengan strata pendidikan tinggi, namun badan ini juga memperkerjakan penasehat hukum, ahli teknologi informasi, editor dan mereka dengan keahlian lain yang dibutuhkan untuk memperkuat misi badan ini.

Struktur CBO terdiri dari kantor Direktur dan 8 bagian:

1) Kantor Direktur

Direktur mengawasi pelaksanaan tugas CBO dalam memberikan informasi yang obyektif, berwawasan, tepat waktu, dan jelas kepada Kongres mengenai isu anggaran dan ekonomi. Wakil Direktur membantu jalannya manajemen badan ini dan menggantikan Direktur ketika berhalangan. Kantor Direktur juga tempat dari *Associate Director* untuk analisa Eonomi, yang memberi kontribusi atas segala aspek dari hasil analitis CBO; *associate director* untuk Urusan Legislasi, yang berfungsi sebagai penghubung CBO dengan Kongres; *associate director* Komunikasi dan anggota kantor Komunikasi, yang bertanggung jawab atas semua kegiatan public CBO, termasuk hubungan dengan media dan publik; dan kantor Penasehat Umum, yang melaksanakan urusan hukum dan akuisisi dari badan ini.

2) Divisi Analisa Anggaran

Divisi Analisa Anggaran membuat proyeksi paduk dari pengeluaran federal, estimasi biaya formal dari semua RUU yang disetujui oleh komisi di Konggres, dan estimasi biaya informal untuk ribuan usulan yang sedang dipertimbangkan oleh komisi. Estimasi biaya formal mencakup estimasi tidak saja pengaruh suatu undang-undang pada anggaran federal, namun juga menilai biaya yang dibebankan ke pemerintah pusat, lokal dan suku. Divisi ini juga membuat kontribusi penting atas berbagai laporan analitis CBO dan membuat:

- Analisa tahunan atas Anggaran Presiden,
- Opsi-opsi Anggaran, setiap dua tahun,
- Kajian Anggaran, bulanan,
- *Scorekeeping* atas legislasi yang telah disahkan,
- Kompilasi tahunan untuk alokasi yang tidak berotorisasi dan alokasi yang otorisasi berakhir

3) Divisi Analisa Keuangan

Analisis kebijakan dari divisi Analisa Keuangan berfokus pada komitmen keuangan pemerintah federal , termasuk kredit federal dan program asuransi dan perusahaan yang didukung pemerintah. Divisi ini juga menyiapkan dukungan untuk seluruh CBO berupa evaluasi keuangan, model keuangan, penilaian resiko, dan proyeksi variable keuangan.

4) Divisi Kesehatan, Pensiun, dan Analisa Jangka Panjang

Divisi ini menganalisa program dan kebijakan federal mengenai perawatan kesehatan dan pensiunan, termasuk Medicare, Medicaid, subsidi yang harus disediakan melalui jaringan asuransi kesehatan, dan Keamanan Sosial. Divisi ini mengerjakan beberapa kebijakan yang mengalami perdebatan panas di Konggres, membuat laporan atas serangkaian isu kebijakan dan opsi-opsinya, dan menyediakan analisa yang mendetail mengenai usulan legislasi. Divisi ini bertanggung jawab atas proyeksi jangka panjang CBO dan mengkolaborasi analisa mengenai dampak jangka panjang dari usulan legislasi,

5) Divisi Analisa Ekonomi Makro

Divisi Analisa Ekonomi Makro menghasilkan proyeksi ekonomi CBO, yang mendasari proyeksi anggaran CBO. Divisi ini juga mempelajari perkembangan-perkembangan besar diperekonomian, termasuk kecenderungan dalam partisipasi dan produktivitas tenaga kerja, perdagangan internasional, dan arus uang, dan meledaknya dan melemahnya property, krisis keuangan, resesi, dan pemulihan ekonomi yang lemah. Selain itu, divisi ini menganalisa dampak jangka pendek dan panjang dari usulan perubahan di bidang perpajakan dan kebijakan pengeluaran.

6) Divisi Manajemen, Bisnis, dan Pelayanan Informasi

Divisi ini menyiapkan pelayanan administrasi dan dukungan lainnya untuk CBO. Pekerjaannya meliputi mengelola sumber daya manusia, sistem keuangan, sumber-sumber informasi dan teknologi, perpustakaan, dan fasilitas lainnya. Selain itu, divisi ini bertanggung jawab untuk editing dan membuat publikasi-publikasi CBO dan untuk berkordinasi dengan badan-badan pendukung di Konggres.

7) Divisi Kajian Ekonomi Mikro

Divisi Kajian Ekonomi Mikro menganalisa sejumlah besar program dan kebijakan yang mempunyai implikasi yang signifikan pada anggaran federal dan perekonomian. Isu-isu tersebut mencakup program federal terkait dengan pendidikan dan keamanan pendapatan, investasi federal di infrastruktur fisik seperti jalan tol, kebijakan federal terkait dengan energi, sumber daya alam, iklim dan lingkungan hidup. Divisi ini juga membuat estimasi atas biaya yang dimandatkan oleh legislasi federal kepada sektor swasta.

8) Divisi Keamanan Nasional

Divisi Keamanan Nasional menganalisa isu-isu terkait dengan anggaran pertahanan, masalah veteran, dan keamanan dalam negeri. Tiap tahun, divisi ini menyiapkan proyeksi jangka panjang dari biaya kebijakan dari Departemen Pertahanan. Divisi ini secara berkesinambungan menguji

cara-cara alternatif untuk mencapai kemampuan militer tertentu, biaya untuk perawatan kesehatan untuk anggota militer dan veteran, dan pro kontra dari kemungkinan perubahan dari kompensasi untuk anggota militer dan manfaat yang diterima oleh para veteran.

9) Divisi Analisa Pajak

Divisi Analisa Pajak memproyeksi penerimaan federal dimasa mendatang (dari pajak pendapatan pribadi, pajak pendapatan perusahaan, pajak daftar gaji, dan sumber lain) menggunakan model ekonomi dan teknik simulasi mikro. Divisi ini juga menganalisa distribusi pajak-pajak federal dan pengeluaran, dan melihat bagaimana kemungkinan perubahan dari UU pajak akan mempengaruhi perilaku pembayar pajak dan perekonomian keseluruhan.

Produk CBO

CBO memberikan informasi tentang anggaran dan ekonomi dalam berbagai cara dan dari beragam hal di proses legislative.

a. Proyeksi Anggaran dan Perkiraan Ekonomi

Laporan CBO mengenai anggaran dan outlook ekonomi meliputi periode 10 tahun yang digunakan dalam proses budget kongres. Laporan-laporan tersebut memberikan dan menjelaskan paduk proyeksi anggaran dan perkiraan ekonomi, yang biasanya berdasarkan hukum yang berlaku menyangkut penerimaan dan pengeluaran federal. Laporan tersebut juga menjelaskan perbedaan antara proyeksi saat ini dan sebelumnya, membandingkan perkiraan ekonomi dengan hasil perkiraan lainnya, dan memperlihatkan dampak anggaran dari beberapa asumsi kebijakan alternatif.

Penerbitan: beberapa kali setahun. Proyeksi anggaran dan perkiraan ekonomi biasanya diterbitkan tiap Januari dan diperbaharui pada bulan Agustus. Sebagai tambahan, proyeksi anggaran diperbaharui tiap bulan Maret.

b. Analisa atas Anggaran yang diajukan Presiden

CBO memperkirakan dampak anggaran dari usulan dalam anggaran Presiden dengan menggunakan perkiraan ekonomi sendiri demikian juga asumsi estimasinya. CBO secara independen ‘mengestimasi ulang’ anggaran Presiden sehingga Kongres dapat membandingkan usulan penerimaan dan pengeluaran pemerintah dengan paduk penerimaan dan pengeluaran CBO dan dengan usulan lain menggunakan asumsi ekonomi dan teknis satuan yang konsisten

Pembuatan: tiap tahun. Analisa anggaran biasanya diterbitkan tiap bulan Maret, diikuti pada bulan April dengan analisa dampak usulan penganggaran Presiden pada perekonomian dan, pada gilirannya, secara tidak langsung pada anggaran federal.

c. Opsi Anggaran

Secara berkala, CBO menghasilkan sejilid referensi yang menguji opsi untuk mengurangi defisit anggaran. Jilid ini meliputi berbagai opsi, yang diambil dari berbagai sumber, untuk mengurangi pengeluaran dan menambah penerimaan. Untuk setiap opsi, jilid tersebut memperlihatkan estimasi pengaruhnya pada anggaran dan wacana pro dan kontra nya namun tidak membuat rekomendasi. Sebagai tambahan, CBO memproduksi laporan-laporan (dibahas dibawah) yang menguji pilihan kebijakan untuk program federal yang spesifik dan aspek-aspek dari kode pajak.

Penerbitan: biasanya setiap tahun ganjil, agar sesuai dengan permulaan tiap Kongres yang baru.

d. Proyeksi Anggaran Jangka Panjang

CBO menyediakan proyeksi anggaran untuk Konggres yang melampaui jendela anggaran standard selama 10 tahun. Proyeksi tersebut biasanya merentang 25 tahun namun dapat diperpanjang sampai 75 tahun kedepan. Proyeksi tersebut memperlihatkan dampak kecenderungan demografik dan meningkatnya biaya pemeliharaan kesehatan pada pengeluaran, penerimaan dan defisit federal. CBO juga memproyeksikan

dampak ekonomi untuk alternatif kebijakan anggaran jangka panjang.

e. Estimasi Biaya

CBO membuat estimasi biaya secara formal dan tertulis dari setiap draft undang-undang “yang dilaporkan” (disetujui) oleh komisi-komisi di Kongres untuk memperlihatkan bagaimana undang-undang tersebut akan mempengaruhi pengeluaran atau penerimaan selama 5 atau 10 tahun kedepan, tergantung kepada jenis pengeluaran yang ada. Setiap estimasi biaya mencakup satu bagian yang menjelaskan dasar dari estimasi. Untuk hampir semua undang-undang pajak, CBO menggunakan estimasi yang dibuat oleh staf komisi bersama Kongres tentang Perpajakan, tim tersendiri yang berkerja erat dengan dengan komisi-komisi *tax writing* Kongres. Selain estimasi formal yang tertulis, CBO membuat sejumlah besar estimasi awal yang sifatnya informal pada saat komisi sedang mempertimbangkan legislasi apa yang akan dibuat, pada saat amandemen suatu undang-undang sedang dibahas, dan pada tahapan-tahapan lain diproses legislasi.

Pembuatan: sepanjang tahun, pembuatan estimasi formal biasanya sejumlah antara 500 dan 700 setiap tahunnya.

f. Analisa dari Mandat Federal

CBO menganalisa biaya yang akan diakibatkan oleh sebuah usulan undang-undang pada pemerintah pusat, lokal dan kesukuan, dan juga akibatnya pada sektor swasta. Jika estimasi biaya selama 5 tahun dari sebuah mandate melebihi ambang tertentu, badan ini melaporkan biayanya dan membuat dasar dari estimasinya. CBO menghasilkan pernyataan mandate dengan estimasi biayanya untuk setiap RUU yang disetujui oleh komisi.

Pembuatan: sepanjang tahun, sebagai tambahan, CBO membuat laporan tiap musim semi yang mendata semua pekerjaan menganalisa mandat ditahun sebelumnya.

g. Tinjauan Anggaran Secara Bulanan

CBO menerbitkan analisa bulanan setiap pengeluaran dan penerimaan federal total pada bulan sebelumnya, bulan berjalan , dan tahun fiskal sampai sekarang. Analisa ini berguna agar Konggres dan masyarakat mengetahui kondisi bulanan dari anggaran.

Penerbitan: hari kerja kelima setiap minggunya.

h. Scorekeeping untuk Undang-undang yang telah disahkan

CBO menyiapkan tabulasi kekerapan mengenai kegiatan Konggres yang mempengaruhi pengeluaran dan penerimaan bagi komisi Anggaran dan *Appropriations*. Laporan *scorekeeping* tersebut memberikan informasi mengenai apakah langkah-langkah legislasi telah sesuai dengan tingkat pengeluaran dan penerimaan yang ditetapkan oleh ketentuan anggaran .

Penerbitan: berkala selama setahun.

i. Kompilasi appropriation yang tidak diotorisasi atau otorisasinya sudah kedaluarsa

CBO menyiapkan laporan yang mendata semua program dan kegiatan yang didanai untuk tahun fiskal yang berjalan dimana otorisasi nya sudah kadaluarsa atau akan kadaluarsa selama tahun fiskal berjalan.

Penerbitan: setiap tahun pada bulan Januari.

j. Laporan tentang Program Pemulihan Aset Bermasalah

Konggres membentuk Program Pemulihan Aset Bermasalah (TARP) pada tahun 2008 untuk menstabilkan pasar uang. Dua kali setahun OMB melaporkan biaya dari program tersebut, dan seperti disyaratkan oleh undang-undang, CBO kemudian memeriksa tiap laporan OMB.

Pembuatan: dua kali setahun, dalam jangka waktu 45 hari dari laporan TARP yang dihasilkan oleh OMB.

k. Laporan mengenai Undang-undang Pemulihan dan Reinvestasi Amerika

Undang-undang Pemulihan dan Reinvestasi Amerika (ARRA) tahun 2009 mengharuskan CBO untuk memberikan pendapat atas laporan-laporan yang disampaikan oleh penerima pendanaan ARRA yang menjelaskan

jumlah pekerjaan yang didanai melalui kegiatan mereka. Estimasi CBO , yang badan ini anggap lebih komprehensif daripada laporan penerima dana, berdasar pada fakta-fakta dari sejumlah kebijakan dimasa lalu dan pada hasil berbagai model ekonomi.

Penerbitan: setiap kuartal

i. *Laporan Penyitaan*

Berdasarkan UU Anggaran Berimbang dan Kontrol atas Defisit Darurat tahun 1985, yang telah direvisi dengan UU Pengawasan Anggaran tahun 2011, CBO diharuskan untuk membuat laporan yang menjelaskan estimasi dari batasan-batasan tertentu atas otoritas kehati-hatian anggaran (yaitu otoritas yang dimandatkan oleh undang-undang *Appropriation* agar pemerintah mendapatkan kewajiban keuangannya. Secara terpisah, berdasarkan estimasinya sendiri, OMB akan menentukan apakah sebuah *penyitaan* (pembatalan atas sumber-sumber anggaran) dibutuhkan sesuai perintah undang-undang dan, jika demikian, alokasi sumber-sumber yang dibatalkan.

Pembuatan: dua kali setahun

m. *Laporan Analitik*

Sebagai tambahan atas laporan-laporan yang disebutkan diatas, CBO menyiapkan laporan-laporan analitik yang menguji program federal tertentu, aspek-aspek dari peraturan pajak, dan tantangan anggaran dan ekonominya. Laporan ini meliputi sejumlah besar pokok permasalahan, termasuk pemeliharaan kesehatan, pertumbuhan ekonomi, keamanan pendapatan, pendidikan, perpajakan, energi, lingkungan hidup, keamanan nasional, isu-isu keuangan, infrastruktur, dan banyak lagi. Hampir semua laporan CBO memberikan sejumlah pilihan untuk perubahan pada program federal peraturan pajak yang sedang diteliti. Laporan-laporan tersebut umumnya mencakup estimasi dampak anggaran atau dampak ekonomi, atau kedua-duanya, dari setiap pilihan, dan juga wacana pro dan kontranya. Seperti laporan CBO lainnya, tidak ada rekomendasi yang dibuat. Beberapa laporan CBO memuat latar

belakang informasi dari analisa CBO yang pernah ada untu menguatkan transparansi dari hasil kerja badan ini.

Laporan CBO kebanyakan dibuat atas permintaan dari Ketua atau Ranking Minority Member dari komisi atau subkomisi atau pimpinan dari partai manapun di Dewan ataupun Senat. Badan ini dapat juga menyampaikan analisa sebagai testimoni dihadapan Komisi Konggres bukan hanya dalam bentuk laporan. Selain itu, pimpinan dan para analis CBO kadang juga menyampaikan presentasi didepan kelompok profesional , dan presentasinya diunggah di website CBO. Badan ini juga terkadang meringkas laporannya dalam bentuk yang tidak terlalu tradisional (misalnya dalam infografik) yang juga dapat diunduh dari website CBO.

Pembuatan: sepanjang tahun.

n. Kertas Kerja

Kertas kerja CBO mencakup tulisan yang menjelaskan deskripsi teknik dari analisa CBO yang resmi, dan tulisan yang mewakili riset independen dari analis CBO. Melalui kertas kerja ini, CBO bertujuan untuk menguatkan transparansi dari kerjanya dan mendorong kajian dari luar atas kertas kerja tersebut. Kertas kerja ini tidak melalui review dan proses editing dari CBO.

Pembuatan : sepanjang tahun.

o. Informasi Data dan Teknis

Untuk menjelaskan secara lebih detail mengenai proyeksi penganggaran dan keuangan CBO dan untuk menambah transparansi atas analisa CBO lainnya, badan ini memuat sejumlah besar data dan informasi teknis lainnya dalam website.

Pembuatan: sepanjang tahun.

Suasana kelas pada saat penyampaian materi





3. *Congressional Research Service (CRS)*

CRS adalah CRS adalah sebuah divisi dari Library of *Congress* dan berlaku sebagai salah satu dari tiga instansi pemerintah yang berada di dalam Cabang Legislatif, bersama dengan *Government Accountability Office (GAO)* dan *Congressional Budget Office (CBO)*, yang dibentuk pada tahun 1914. CRS menyediakan riset dan analisa yang mendalam langsung kepada anggota Kongres, komisi-komisi Kongres dan staffnya secara non partisan dan rahasia. Para ahli CRS membantu Kongres pada setiap tahap proses legislative, dari pertimbangan awal yang mendahului penulisan perancangan undang-undang melalui sidang komisi dan debat pendapat, sampai kepada pengawasan undang-undang yang telah disahkan dan berbagai kegiatan instansi. Pelayanan yang diberikan oleh CRS kepada Kongres berupa perancangan memoranda sampai kepada pemberian kesaksian di depan Kongres, menyelenggarakan seminar dan lokakarya dan menyediakan pelatihan kepada staf Kongres yang bekerja di bidang prosedur legislative dan anggaran. Dengan dana anggaran sebanyak \$107 juta, dan 615 pegawai termasuk 250 orang analis anggaran, CRS mengeluarkan 3000 laporan, naskah pendek dan panjang setiap tahunnya.



4. Government Accountability Office (GAO)

Keller adalah Director of International Relations yang menjelaskan mengenai profil GAO dan perannya bagi Kongres. GAO yang biasa disebut dengan “*Investigative arm of Congress*” atau “*congressional watchdog*” yaitu lembaga non-partisan independen yang bertugas untuk melakukan audit yang bertujuan untuk memastikan apakah dana federal dibelanjakan secara efisien dan efektif. GAO memberikan rekomendasi kepada Kongres dan kepala lembaga eksekutif tentang cara-cara untuk membuat pemerintahan efisien, efektif, etis, adil dan responsif. GAO menyajikan informasi yang objektif, berdasarkan fakta, non partisan, non ideology, adil, dan seimbang bagi Kongres. GAO memiliki tiga nilai inti yaitu Akuntabilitas, Integritas, dan Andal. GAO mendukung pengawasan Kongres melalui kegiatan-kegiatan berikut:

- a. Audit Operasional untuk memastikan apakah dana federal dibelanjakan secara efisien dan efektif;
- b. Investigasi atas dugaan aktivitas ilegal atau ketidakpatuhan;

- c. Melaporkan mengenai bagaimana program dan kebijakan pemerintah dalam mencapai tujuan;
- d. Melakukan analisis kebijakan dan menguraikan pilihan-pilihan yang akan menjadi pertimbangan Kongres; dan
- e. Menerbitkan putusan dan pertimbangan.



5. Office Management and Budget (OMB)

Misi utama dari OMB adalah untuk melayani Presiden Amerika Serikat dalam melaksanakan visinya di seluruh Cabang Eksekutif. OMB adalah komponen terbesar di dalam Cabang Eksekutif Kepresidenan. Dinas ini berada langsung di bawah Presiden dan membantu berbagai macam departemen dan instansi pemerintah Federal untuk melaksanakan komitmen dan prioritas yang dikeluarkan oleh Presiden. Sebagai tangan pelaksanaan dan penegakan kebijakan Presiden di seluruh pemerintahan, OMB melaksanakan misinya melalui lima proses penting yang penting kepada kemampuan Presiden untuk merencanakan dan melaksanakan prioritasnya di seluruh Cabang Eksekutif.

Pertemuan dengan OMB yang diwakili oleh Matthew Vaeth (*Assistant Director for Legislative Reference*) membicarakan secara lebih khusus tentang koordinasi OMB dengan Kongres untuk izin legislatif dan koordinasi (peninjauan dan persetujuan dari seluruh komunikasi instansi dengan Kongres, termasuk pemberian kesaksian dan perancangan undang-undang) untuk memastikan ketetapan pandangan dan proposal instansi legislatif dengan kebijakan Presiden. Dalam pertemuan tersebut OMB juga membahas tentang pentingnya hubungan antar-cabang dan bagaimana OMB berkomunikasi dengan cabang legislatif.



6. Presentasi dari Negara Kenya, Kolombia dan Peru

Kenya



Kenya memiliki kantor Anggaran Parliamentary Budget Office (PBO), yang dibentuk pada tahun 2007 dan memiliki 25 orang analis. Pembentukan PBO dalam rangka memperkuat peran Parlemen Kenya. Fungsi utama PBO Kenya adalah membuat dan menyediakan analisis trend ekonomi serta memberikan nasehat teknis secara professional kepada Parlemen. PBO tidak memberikan rekomendasi tetapi hanya memberikan alternative pilihan. PBO Kenya memiliki staf professional dan non partisan dengan kedudukan dibawah Direktorat Informasi dan Riset. PBO memiliki 3 divisi yaitu Divisi Analisa Pajak, Divisi Analisis Makro Ekonomi dan Divisi Pembelanjaan. Output yang dihasilkan PBO antara lain berupa laporan analisa, makalah, dan kajian.

PBO Kenya masih terus berusaha meningkatkan dan membangun kapasitas organisasi untuk menjadi lebih baik.

Kolombia



Pemerintahan Kolombia mengambil bentuk kepresidenan demokrasi perwakilan republik yang ditetapkan oleh Konstitusi Kolombia tahun 1991. Pemerintahan Kolombia terbagi tiga kekuasaan; eksekutif, legislatif dan yudikatif dengan lembaga kontrol dan lembaga pemilihan khusus. Presiden Kolombia adalah puncak eksekutif tertinggi di Kolombia dan juga sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dengan kekuasaan administratif. Cabang legislatif di Kolombia adalah Kongres Nasional Kolombia yang membentuk majelis teratas Senat Kolombia dan Majelis Perwakilan Kolombia. Kedua badan legislatif dan eksekutif berbagi kekuasaan, sedangkan yudikatif merupakan badan independen. Cabang yudikatif berada dibawah sistem adversarial dengan bentuk Mahkamah Agung Kolombia yang merupakan badan tertinggi dan berbagi tanggungjawab dengan Lembaga Negara.

Kolombia tidak memiliki kantor anggaran seperti CBO, tetapi mempunyai Centre Study Legislatif yaitu pusat kajian yang menghasilkan dokumen-dokumen untuk mendukung fungsi legislatif.

Semua anggaran kongres harus mendapat persetujuan dari pemerintah.

Peru



Peru belum memiliki kantor anggaran, dalam proses untuk pembentukan kantor anggaran, namun masih terdapat kendala yaitu kurangnya dukungan dari Dewan dan anggarannya masih belum memadai.

7. Forum Group Discussion (FGD)



Negara peserta melakukan diskusi mengenai hasil diperoleh dalam seminar dan rencana-rencana aksi yang akan dilakukan di negaranya.

III. FUNGSI ANGGARAN DPR DAN PENDUKUNGNYA

A. Fungsi Anggaran DPR

Anggaran negara adalah suatu bentuk kesepakatan politik antara eksekutif dan legislatif dalam mensinergikan berbagai kepentingan yang berbeda mengenai rencana kerja yang akan digunakan dimasa mendatang dan bagaimana cara pembiayaannya. Penetapan anggaran negara bukan hanya besaran angka semata tetapi harus didasarkan pada prinsip-prinsip penganggaran dan mewujudkan APBN sesuai dengan fungsinya yaitu:

1. **Fungsi otorisasi**, anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan
2. **Fungsi perencanaan**, anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan
3. **Fungsi pengawasan**, anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
4. **Fungsi alokasi**, anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian
5. **Fungsi distribusi**, kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
6. **Fungsi stabilisasi**, anggaran Pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian

Menurut UUD Tahun 1945, Presiden berkewajiban menyusun dan mengajukan Rancangan Undang-Undang APBN (RUU APBN) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang diatur dalam bentuk undang-undang. Siklus penyampaian, pembahasan dan penetapan RUU APBN merupakan suatu rangkaian kegiatan yang melibatkan beberapa pihak, yaitu :

1. **Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**
2. **Dewan Pertimbangan Daerah Republik Indonesia**

3. **Pemerintah**, diwakili oleh Menteri Keuangan dan/atau Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas termasuk juga semua Kementerian dan lembaga yang ditunjuk untuk mewakili.
4. **Bank Indonesia**
5. **Pihak-pihak lain**, yang keterangan pendapat dan data-datanya dibutuhkan selama pembahasan, seperti; Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Teknis (Departemen Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, serta Kementerian lainnya yang dibutuhkan)
6. **Masyarakat**, dapat turut serta berpartisipasi dalam proses pembahasan APBN. Partisipasi masyarakat tersebut dapat disampaikan melalui forum Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) baik di Komisi maupun Badan Anggaran.

Sesuai dengan UUD 1945, Undang-Undang No.27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, menyebutkan bahwa DPR RI memiliki 3 fungsi, yaitu **fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan**.

1. Fungsi Legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk Undang-undang.
2. Fungsi Anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden.
3. Fungsi Pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN.

Dalam **fungsi anggaran**, tugas dan wewenang DPR adalah:

1. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama
2. Membahas bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden

3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan APBN
4. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama

Fungsi anggaran DPR akan dapat secara optimum dilakukan manakala DPR dapat menjalankan peran dan fungsinya dalam setiap tahapan dalam siklus APBN. Dengan mengacu kepada siklus anggaran, maka DPR dihadapkan kepada implementasi fungsi anggaran, yaitu :

1. Tahap penyampaian/pengajuan ke DPR
2. Tahap Pembahasan APBN
3. Tahap Penetapan APBN
4. Tahap Pengawasan Pelaksanaan APBN
5. Tahap Pengawasan Pertanggungjawaban APBN

Fungsi anggaran DPR melalui fungsi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yaitu Komisi dan Badan Anggaran melalui :

1. Pembicaraan Pendahuluan RAPBN;
2. Pembahasan Laporan Semester I dan Prognosis Semester II;
3. Pembahasan RUU tentang APBN Perubahan;
4. Pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN;
5. Pembahasan RUU tentang APBN

B. Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI sebagai Dukungan Keahlian bagi DPR

Dengan memperhatikan tugas pokok fungsi DPR RI tersebut diatas, maka DPR RI membutuhkan *supporting system* yang diberikan tugas dan fungsi untuk mendukung pelaksanaan fungsi anggaran DPR RI. Dengan berlakunya UU No. 17 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 42 tahun 2014 mengamatkan

terbentuknya Badan Keahlian Dewan (BKD). BKD memiliki tugas dan fungsi untuk memberikan dukungan keahlian kepada anggota DPR RI. BKD terbagi menjadi 5 (lima) pusat, yaitu 1) Pusat Perancangan Undang-Undang, 2) Pusat Penelitian, **3) Pusat Kajian Anggaran**, 4) Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, dan 5) Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.

Pelaksanaan tugas dan fungsi untuk dukungan pelaksanaan fungsi anggaran tersebut secara administrasi dan teknis dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal (Setjen) dan untuk dukungan substansi dilaksanakan oleh Badan Keahlian. Pada Badan Keahlian, pelaksanaan tugas dan fungsi untuk dukungan pelaksanaan fungsi anggaran DPR RI dilaksanakan oleh Pusat Kajian Anggaran.

Tugas dan Fungsi

Pusat Kajian Anggaran merupakan pengembangan dari tugas dan fungsi dari Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN pada Organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI. Pusat Kajian Anggaran secara resmi terbentuk setelah disahkannya Peraturan Sekjen DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Sesuai dengan Peraturan Sekjen tersebut.

Tugas Pusat Kajian Anggaran adalah mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang perancangan APBN.

Adapun **funksinya** adalah:

1. Perumusan dan evaluasi rencana strategis Pusat Kajian Anggaran;
2. Perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Pusat Kajian Anggaran;
3. Perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Pusat Kajian Anggaran;
4. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Pusat Kajian Anggaran;
5. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan pengkajian anggaran;
6. Pelaksanaan dukungan pengkajian anggaran;

7. Pelaksanaan tata usaha Pusat Kajian Anggaran;
8. Penyusunan laporan kinerja Pusat Kajian Anggaran; dan,
9. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Badan Keahlian DPR RI.

Untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Pusat Kajian Anggaran membentuk dua Bidang Keahlian. Pertama, Bidang Keahlian Perencanaan Pembangunan, Ekonomi Makro dan Pendapatan Negara dengan tugasnya mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Kajian Anggaran di bidang perencanaan pembangunan, ekonomi makro dan pendapatan negara. Adapun fungsi bidang tersebut adalah:

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan perencanaan pembangunan, ekonomi makro dan pendapatan nasional; dan
2. Melaksanakan dukungan pengkajian perencanaan pembangunan, ekonomi makro dan pendapatan Negara.

Kedua, Bidang Keahlian Belanja Negara dan Pembiayaan dengan tugasnya mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Kajian Anggaran di bidang keahlian belanja negara dan pembiayaan. Adapun fungsi bidang tersebut adalah:

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan analisa belanja negara dan pembiayaan; dan,
2. Melaksanakan dukungan analisa belanja negara dan pembiayaan;

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Belajar dari praktek di negara maju seperti Amerika, bahwa peran dan fungsi parlemen dalam anggaran hanya dapat optimal dilakukan jika terdapat *supporting system* yang kuat. Dalam pembahasan dan penetapan anggaran yang diajukan Presiden, Kongres didukung secara keahlian oleh tiga instansi pemerintah yang berada di dalam Cabang Legislatif yang bersifat independen dan non partisan, yaitu :
 - *Congressional Budget Office* (CBO) yang melakukan analisis independen tentang hal-hal terkait anggaran dan ekonomi untuk membantu proses anggaran Kongres. Setiap tahunnya, para ahli ekonomi dan analis anggaran dari dinas ini mengeluarkan puluhan laporan dan ratusan perkiraan dana untuk legislasi yang diusulkan; melakukan analisa yang obyektif dan tidak memihak; dan mengangkat pegawainya hanya berdasarkan kemampuan profesional tanpa memandang keterlibatan politik. CBO tidak memberikan rekomendasi kebijakan, dan setiap laporan dan perkiraan dana menyimpulkan metodologi yang menjadi pokok analisa tersebut.
 - *Congressional Research Service* (CRS) yang menyediakan analisa dan riset kebijakan publik yang mendalam kepada Kongres. Para ahli CRS membantu Kongres pada setiap tahap proses legislative, dari pertimbangan awal yang mendahului penulisan perancangan undang-undang melalui sidang komisi dan debat pendapat, sampai kepada pengawasan undang-undang yang telah disahkan dan berbagai kegiatan instansi. CRS juga memberikan kepada Kongres berupa perancangan memoranda sampai kepada pemberian kesaksian di depan Kongres, menyelenggarakan seminar dan lokakarya dan menyediakan pelatihan kepada staf Kongres yang bekerja di bidang prosedur legislative dan anggaran. Dengan dana anggaran sebanyak

\$107 juta dan 615 pegawai, CRS mengeluarkan 3000 laporan dan naskah pendek dan panjang setiap tahunnya.

- *Government Accountability Office (GAO)* yang bertugas untuk melakukan audit yang bertujuan untuk memastikan apakah dana federal dibelanjakan secara efisien dan efektif serta memberikan rekomendasi kepada Kongres dan kepala lembaga eksekutif tentang cara-cara untuk membuat pemerintahan efisien, efektif, etis, adil dan responsif. GAO menyajikan informasi yang objektif, berdasarkan fakta, non partisan, non ideology, adil, dan seimbang bagi Kongres. GAO memiliki tiga nilai inti yaitu Akuntabilitas, Integritas, dan Andal.

GAO mendukung pengawasan Kongres melalui kegiatan-kegiatan berikut:

- a. Audit Operasional untuk memastikan apakah dana federal dibelanjakan secara efisien dan efektif;
- b. Investigasi atas dugaan aktivitas ilegal atau ketidakpatuhan;
- c. Melaporkan mengenai bagaimana program dan kebijakan pemerintah dalam mencapai tujuan;
- d. Melakukan analisis kebijakan dan menguraikan pilihan-pilihan yang akan menjadi pertimbangan Kongres; dan
- e. Menerbitkan putusan dan pertimbangan.

2. *Office Management and Budget (OMB)*

OMB adalah komponen terbesar di dalam Cabang Eksekutif Kepresidenan. Dinas ini berada langsung di bawah Presiden dan membantu berbagai macam departemen dan instansi pemerintah Federal untuk melaksanakan komitmen dan prioritas yang dikeluarkan oleh Presiden. Sebagai tangan pelaksanaan dan penegakan kebijakan Presiden di seluruh pemerintahan, OMB melaksanakan misinya melalui lima proses penting yang penting kepada kemampuan Presiden untuk merencanakan dan melaksanakan prioritasnya di seluruh Cabang Eksekutif.

B. Saran

Seperti yang telah diuraikan pada bab III mengenai tugas dan wewenang DPR dalam fungsi anggaran, dimana peran DPR begitu sentral, khususnya dalam pembahasan dan penetapan anggaran negara sesuai siklus APBN bersama dengan pemerintah. Untuk kelancaran pelaksanaan peran dan fungsi DPR dalam bidang anggaran tersebut, dibutuhkan adanya *supporting system* yang diberikan tugas dan fungsi untuk mendukung pelaksanaannya.

Salah satu tugas Pusat Kajian Anggaran adalah mendukung secara substansi untuk kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR di bidang anggaran. Kegiatan analisis dalam Pusat Kajian Anggaran meliputi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBN. Namun dikarenakan Pusat Kajian Anggaran merupakan organisasi yang baru dibentuk, sehingga masih terdapat beberapa keterbatasan, sehingga diperlukan adanya perbaikan/peningkatan, yaitu terhadap:

1. Sumber Daya Manusia, perlunya peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitas SDM. Pusat Kajian Anggaran didukung oleh 18 orang pegawai yang terdiri dari 1 (satu) Pejabat Tinggi Pratama, 5 (lima) orang Pejabat Administrasi (1 Pegawai dan 4 Pelaksana) dan 12 (dua belas) orang Pejabat Fungsional Tertentu (JFT) Analis APBN. Dilihat dari perbandingan antara JFT dan Non JFT belum seimbang (hanya 2:1) karena idealnya jumlah JFT harus lebih banyak, minimal 4:1. Begitu juga dilihat dari keberadaan SDM secara kuantitas belum sebanding dengan kebutuhan pelayanan analisis APBN kepada Dewan sehingga harus ditingkatkan. Dilihat dari jumlah Analis APBN) sebanyak 12 orang masih jauh dari rekomendasi Konsultan *World Bank* sebanyak 60 orang. Dari pegawai 18 (sembilan belas) orang dapat dirinci dari sisi akademis yaitu berijazah S-3 sebanyak 1 orang (5,26%), S-2 sebanyak 11 orang (63,16%), S-1 sebanyak 2 orang (10,53%), dan SMU sebanyak 4 orang (21,05%). Dari sisi kuantitas tentunya masih jauh apabila dibandingkan dengan jumlah staf CBO Amerika yang berjumlah 230 orang. Dari komposisi tingkat pendidikan tersebut setiap pegawai dituntut untuk meningkatkan potensinya masing-masing.

2. Agar SOP dilaksanakan secara efektif. Pusat Kajian Anggaran telah memiliki mekanisme hubungan tata kerja yang baku (SOP) dalam membuat suatu output, baik itu analisis, referensi, dan pendampingan serta kegiatan-kegiatan lain yang mendukung output. Dengan adanya mekanisme hubungan tatakerja yang baku tersebut, diharapkan kualitas dari output yang dihasilkan akan semakin meningkat. Sejak tahun 2010 telah diidentifikasi beberapa 13 SOP. Namun demikian yang telah disusun sebanyak 3 SOP dan pelaksanaannya belum optimal.
3. Sarana dan prasarana. Ruang kerja yang nyaman menjadi salah satu syarat yang harus dimiliki oleh suatu unit kerja. Kondisi ruang kerja di Pusat Kajian Anggaran belum mencerminkan kondisi yang ideal untuk menjalankan seluruh aktivitas tugas pokok dan fungsinya. Keterbatasan sarana dan prasarana termasuk didalamnya pemenuhan data untuk kepentingan *database*. Saat ini belum adanya nomenklatur anggaran untuk pembelian data/publikasi *online* yang dibutuhkan.
4. Koordinasi dengan pihak eksternal untuk akses data. Dalam menghasilkan produk Kajian APBN dibutuhkan data dan informasi yang lengkap dan akurat, sementara sumber-sumber pendukung tersebut terutama didapat dari pihak eksternal dan mereka sendiri tidak mudah memberikan akses data tersebut.
5. Sikap professional dan non-partisan. DPR merupakan lembaga politik, terdiri dari 560 orang Anggota, dan 10 (sepuluh) fraksi, dimana masing-masing fraksi mempunyai kepentingan masing-masing terhadap suatu isu-isu tertentu, sehingga jika tidak dikelola dengan baik akan terjebak pada polarisasi kepentingan politik tertentu.
6. Dan kepada Inspektorat Utama, khususnya Inspektorat II yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap Badan Keahlian dan Deputi Persidangan, agar hasil seminar ini dapat menjadi pertimbangan dalam melakukan audit kinerja di lingkungan Badan Keahlian, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas hasil kerja para Pusat Kajian dalam memberikan dukungan terhadap DPR.

V. PENUTUP

Seminar yang diselenggarakan tanggal 12 Maret sampai dengan 19 Maret 2016 sangat besar manfaatnya, selain diberikan pengetahuan dan pemahaman tentang analisa anggaran melalui 3 instansi pendukung di parlemen Amerika yaitu CBO, CRS dan GAO, peserta juga dikenalkan mengenai strategi untuk melakukan peramalan dan teknik analisis makroekonomi, serta mempelajari cara-cara dalam mengolah dan mempersembahkan informasi ke dalam suatu format. Disamping itu peserta dapat mengetahui, bertukar informasi dan mendapatkan pelajaran serta pengalaman dari peserta negara lain,

Demikian laporan akhir seminar HDP Parliamentary Staff dibuat sebagaimana mestinya. dengan harapan bisa menjadi rujukan dan sumber informasi dalam menindak lanjuti kegiatan seminar tersebut.

JAKARTA, APRIL 2016

Indonesian Full Team saat penerimaan sertifikat



Denerimaan Sertifikat

